

Buletin

# CIPTAKARYA

KARYA CIPTA INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN



KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT

EDISI  
02 Tahun XVI  
Februari 2018



**ATASI STUNTING  
DENGAN PENYEDIAAN  
INFRASTRUKTUR DASAR**





# daftar isi

EDISI  
02/Tahun XVI  
Februari 2018



- 04 BERITA UTAMA**  
Atasi *Stunting* dengan Penyediaan Infrastruktur Dasar
- 08 LIPUTAN KHUSUS**  
Kota yang Inklusif Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan
- 12 INFO BARU**  
Cipta Karya Manfaatkan SPAM *Idle Capacity* di Kabupaten Bangka Barat
- 13** Presiden RI Kunjungi Kegiatan Padat Karya di Provinsi Sulsel
- 14** Cipta Karya Gandeng 58 Kepala Daerah Wujudkan 100% Akses Sanitasi Layak 2019
- 15** Presiden Jokowi Tinjau Program KOTAKU dan PISEW di Maluku
- 16** Atasi Pencemaran Air Bersih di Tanjung Jabung Timur

- 17 INOVASI**  
TPS 3R KSM Bantas Lestari, Semangat Wanita Untuk Mengolah Sampah Menjadi Berkah
- 19** Cegah Sampah Masuk ke Laut!
- 21** Partisipasi Aktif Pemuda Dalam Pembangunan Perkotaan
- 24** Simpanlah Sampah pada Tempatnya, Karena Tertib Sampah Dapat Hasilkan Uang
- 26** Sisi Lain Hasil Pembangunan Infrastruktur di Bengkulu
- 28** Gagasan Untuk Pengetahuan Penerapan Teknologi Sektor Air Limbah Dapat Menjadi Ujung Tombak *Sustainable Development* Wilayah
- 30 SEBAIKNYA ANDA TAHU**  
Apa Kata Mereka?

- 32 LENSEK**  
Peresmian Lapangan Tenis *Indoor* dan *Outdoor*
- 33** Kunjungan Presiden ke Wisma Atlet Kemayoran
- 34 SEPUTAR KITA**  
Sumatera Selatan Siap Jalankan Program Padat Karya 2018
- Cipta Karya Serahkan TPA Sampah Kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur
- Cipta Karya Percepat Proses Hibah Lahan Penataan Kawasan Permukiman Nelayan di Bengkulu

# editorial



Buletin

**CIPTAKARYA**

## PELINDUNG

Sri Hartoyo

## PENANGGUNG JAWAB

Rina Agustin Indriani

## DEWAN REDAKSI

Dwityo A. Soeranto, Iwan Suprijanto, Rina Farida,  
Dodi Krispratmadi, Muhammad Sundoro

## PEMIMPIN REDAKSI

Mardi Parnowiyoto

## PENYUNTING REDAKSI

Ardhani P, Indah Raftiarty ER, Astaf Aji Pranaya

## BAGIAN PRODUKSI

Ari Iswanti, Bramanti Nawang Sari, Dewi Savitri,

## BAGIAN ADMINISTRASI & DISTRIBUSI

Fajar Drestha Birawa, Harniati Ulfah


## KONTRIBUTOR

Sri Murni Edi K, Taufan Madiasworo,  
Tanozisoichi Lase, Diana Kusumastuti, Dian Irawati,  
Marsaulina Pasaribu, Didiet A. Akhdiat,  
Boby Ali Azhari, Prasetyo, Ade Syaiful Rachman,  
Meike Kencanawulan, Komang Raka Maharthana,  
Sandhi Eko Bramono,  
Andika Budi Prasetya, Bhima Dhananjaya,  
Airyn Saputri Harahap, Meinar Manurung

## ALAMAT REDAKSI

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru 12110  
Telp/Fax. 021-7245754


Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait  
bidang Cipta Karya ke email [kompuck@gmail.com](mailto:kompuck@gmail.com) atau  
saran dan pengaduan di [www.pu.go.id](http://www.pu.go.id)


 <http://ciptakarya.pu.go.id>

 @ditjenck

 @ditjenciptakarya

 Ditjen Cipta Karya

 Ditjen Cipta Karya

 [kompuck@gmail.com](mailto:kompuck@gmail.com)

## 1.000 Hari Pertama Kehidupan Menentukan Masa Depan

Salah satu prioritas pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 adalah perbaikan gizi, termasuk *stunting*. *Stunting* merupakan prediktor rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dampaknya menimbulkan risiko penurunan kemampuan produktif suatu bangsa. Hal ini membuat pencegahan dan penanggulangan *stunting* menjadi sangat penting.

Kementerian PPN/Bappenas mencatat, Indonesia termasuk ke dalam 17 negara yang mengalami beban ganda permasalahan gizi, berdasarkan *Global Nutrition Report* pada tahun 2014. Di Indonesia tercatat 7,8 juta dari 23 juta balita adalah penderita *stunting* atau sekitar 35,6%. Sebanyak 18,5% kategori sangat pendek dan 17,1% kategori pendek. WHO menetapkan batas toleransi *stunting* maksimal 20% atau seperlima dari jumlah keseluruhan tinggi balita. Ini juga yang mengakibatkan WHO menetapkan Indonesia sebagai negara dengan status gizi buruk. Di Indonesia kondisi *stunting* tertinggi terdapat di Sulawesi Tengah dengan jumlah 16,9% dan terendah di Sumatera Utara dengan 7,2 %. Dalam RPJMN, pemerintah menargetkan penurunan prevalensi *stunting* dari status awal 32,9% menjadi 28% pada tahun 2019.

*Stunting* menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai lantaran masih banyak orang tua yang tak paham kebutuhan asupan gizi (nutrisi) pada anak. *Stunting* merupakan manifestasi dari kegagalan pertumbuhan (*growth faltering*) yang dimulai sejak dalam kandungan hingga anak berusia dua tahun. Pencegahan dan penanggulangan *stunting* harus dimulai secara tepat sebelum kelahiran dan berlanjut sampai anak berusia dua tahun yang dikenal dengan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK).

Sanitasi lingkungan merupakan salah satu kegiatan yang termasuk dalam program 1.000 HPK. Hal tersebut menjadi penyebab tidak langsung yang berpengaruh pada status gizi balita. Sanitasi lingkungan yang tidak baik akan mengakibatkan penyakit diare yang nantinya akan menyebabkan infeksi sehingga menyebabkan kurang gizi. Pembangunan infrastruktur dasar seperti penyediaan air minum dan sanitasi adalah bentuk upaya yang dilakukan Pemerintah dalam penanganan masalah *stunting*. Pendekatan melalui program pemberdayaan masyarakat, perbaikan sanitasi, dan perilaku hidup sehat dan bersih serta peningkatan suplai bidang kesehatan juga sangat diperlukan untuk mengurangi dan mencegah *stunting* di Indonesia. **(Redaksi)**

### Cover :

PAMSIMAS, Desa Rentraen, Kupang,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur





## ATASI *STUNTING* DENGAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 55 miliar untuk mendukung penanganan pengurangan *stunting* di 10 kabupaten prioritas di Indonesia.

**D**ana tersebut digunakan untuk Program Air Limbah Perdesaan sebesar Rp. 30 miliar dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) sebesar Rp. 25 miliar.

Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan

gagal tumbuh, gagal kembang, dan gangguan metabolisme pada anak balita. Terutama pada 1.000 hari pertama sejak di dalam kandungan.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo menuturkan, Indonesia saat ini masih mengalami masalah stunting atau kurang gizi kronis yang cukup serius.

Meminjam hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2016, sebesar 21,7% balita Indonesia termasuk kategori pendek. Dimana persentase tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Barat dengan prevalensi pendek sebesar 32,6%, terdiri dari 12,5% sangat pendek dan 20,1% pendek.

### Intervensi Gizi Spesifik:

- ✓ Edukasi+Sosialisasi
- ✓ Makanan Tambahan
- ✓ Suplemen
- ✓ Imunisasi

### Peran Pemda

### Intervensi Gizi Sensitif:

- ✓ Edukasi+Sosialisasi
- ✓ Infrastruktur Air Minum
- ✓ Infrastruktur Sanitasi
- ✓ Bantuan Keluarga Miskin

### Kerangka Penanganan

“21,7% balita Indonesia termasuk kategori pendek dan persentase tertinggi ada di Kalbar sebesar 32,6%. Ini berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan si anak tersebut, yang pada akhirnya nanti akan mempengaruhi produktivitas anak itu,” ujarnya di gedung Kementerian PUPR Jakarta, Selasa (06/02/2018).

Dikatakannya, masalah *stunting* di Indonesia secara keseluruhan sebenarnya dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi domain dari Kementerian PUPR, khususnya dalam rangka intervensi gizi sensitif. Dimana pihaknya bertanggung jawab dalam ketersediaan air minum dan sanitasi.

Penyebab *stunting* antara lain kurangnya pengetahuan ibu hamil akan pentingnya asupan gizi, kurangnya akses ke pelayanan kesehatan seperti Posyandu, pola makan gizi tidak seimbang, serta lingkungan yang tidak sehat.

Selain masalah gizi, *stunting* juga dipengaruhi oleh masalah kebersihan

dan sanitasi. Masih banyaknya orang yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di ruang terbuka, akses air bersih untuk diminum masih rendah, sehingga membuat anak-anak rentan terhadap penyakit berbahaya seperti diare, kolera, tifus, disentri dan ISPA. Penyakit berbahaya ini dapat membuat kesehatan anak terganggu dan terhambat tumbuh kembangnya.

Sri Hartoyo mengatakan, dalam penanganan *stunting* memerlukan kolaborasi lintas Kementerian dan Lembaga. “Kami di Kementerian PUPR mendukung dalam penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi sehingga mendukung lingkungan yang sehat,” paparnya.

Melalui program Air Limbah Perdesaan, pembangunan sanitasi akan diprioritaskan pada kawasan kumuh miskin dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Melalui pelibatan masyarakat, diharapkan masyarakat lebih merasa memiliki infrastruktur yang dibangun sehingga pemeliharaannya lebih terjamin.

Program ini juga bertujuan untuk

mengurangi jumlah masyarakat yang melakukan BABS. “Upaya penyediaan air minum berkaitan dengan ketersediaan sanitasi sehat. Perilaku BABS juga dapat mengakibatkan pencemaran air. Tidak hanya di perdesaan, di perkotaan misalnya dengan luasan rumah yang semakin kecil yaitu 60 m<sup>2</sup>, jarak antara tangki septik dan sumur bor sangat dekat. Sehingga tangki septik harus dibuat benar, secara periodik disedot dengan mobil tinja dan diolah pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),” jelasnya.

Pada 10 kabupaten prioritas penurunan *stunting*, Ditjen Cipta Karya akan membangun infrastruktur berupa tangki septik individual atau tangki septik komunal yang bisa digunakan oleh 5-10 kepala keluarga maupun kombinasi dari keduanya. Alokasi anggaran per lokasi yakni Rp. 300 juta.

Adapun 10 kabupaten/kota prioritas yakni Rokan Hulu di Provinsi Riau, Lampung Tengah di Provinsi Lampung, Cianjur di Provinsi Jawa Barat, Pemalang dan Brebes di Provinsi Jawa Tengah,

### SEBARAN LOKASI 10 KABUPATEN PRIORITAS PENANGANAN STUNTING







Lombok Tengah di Provinsi NTB, Ketapang di Provinsi Kalimantan Barat, Gorontalo di Provinsi Gorontalo, Maluku Tengah di Provinsi Maluku, dan Lanny Jaya di Provinsi Papua.

Masyarakat juga dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan Pamsimas yang dibantu oleh fasilitator. Kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) atau per-

luasan SPAM yang ada dengan modul sambungan rumah, maupun SPAM yang ada dioptimalkan melalui rehabilitasi dan perluasan sambungan rumah. Alokasi anggaran kegiatan ini per lokasi yakni Rp. 250 juta.

Untuk program Pamsimas, pihaknya akan melakukan pembangunan SPAM baru. Tak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan perluasan SPAM eksisting de-

ngan modul sambungan rumah, dan optimalisasi SPAM eksisting dengan modul sambungan rumah.

"Pelaksanaan program ini dimulai bulan Maret 2018. Perlu diketahui untuk program pemberdayaan masyarakat dimulai dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan ditargetkan rampung akhir Agustus 2018," jelasnya.

Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya saat ini juga memberikan dukungan penyediaan infrastruktur permukiman di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, yang saat ini mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah campak dan gizi buruk.

Dirjen Cipta Karya yang diwakili Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) Dwityo A. Soeranto saat konferensi pers bersama Dirjen Bina Marga Arie Setiadi di Jakarta, Kamis (08/02/2018) mengungkapkan, KLB tersebut disebabkan karena sedikitnya pengetahuan akan pentingnya kesehatan, perilaku hidup masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat, serta akses untuk menuju fasilitas umum seperti Puskesmas belum ada.

Beberapa distrik yang akan dilakukan perbaikan yaitu Distrik Agats yang meliputi Kampung Yepem, Kampung





Syuru, Kampung Kaye, Kota Agats, dan Kampung Ewer. Lalu Distrik Fayit pada Kampung Basim, Distrik Atsj, Distrik Pantai Kasuari pada Kampung Kamur, dan Distrik Awyu pada Kampung Segare.

“Melihat situasi tersebut, ke depan kami dari Ditjen Cipta Karya mencoba mengubah kondisi terutama dari segi fisiknya tanpa melupakan segi non fisik. Keberhasilan kita ke depan bukan hanya dari bagaimana kita menyediakan infrastruktur fisik saja, namun harus didukung dengan segi non fisik di antaranya perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih,” ujar Dwityo.

Dwityo mengatakan, penyediaan infrastruktur permukiman yang akan dibangun di antaranya berupa sarana prasarana air minum dengan membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) di daerah yang memiliki air baku untuk digunakan, membangun 3 Pamsimas di setiap distrik, serta pembuatan embung untuk menampung air hujan.

Lebih lanjut Dwityo menjelaskan, untuk bidang sanitasi akan dibangun MCK komunal, tangki septik komunal, membangun tempat pembuangan sampah sementara, dan menggalakkan Tempat



Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R). Sementara untuk akses jalan lingkungan akan dibangun jalan dengan lebar 2 atau 4 meter untuk mempermudah akses menuju tempat publik.

“Yang terpenting adalah memperta-

hankan kondisi infrastruktur yang telah dibangun melalui pendampingan dari kami selama satu tahun pertama sebelum nantinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat,” tutur Dwityo. **(Teks: redaksi)**



# KOTA YANG INKLUSIF WUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Sesi ke-9 Forum Kota Sedunia atau *The Ninth World Urban Forum (WUF 9)* telah dibuka secara resmi oleh Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Haji Mohammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Kamis (08/02/2018), di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pembukaannya Najib menegaskan, tidak boleh ada yang ditinggalkan dalam pembangunan perkotaan (*no one left behind*) dan pembangunan harus dilakukan secara inklusif.



Terdapat belasan jenis kegiatan dan lebih dari 400 topik yang akan dibahas sepanjang forum ini berlangsung. Beberapa kegiatan di dalam WUF 9 yaitu antara lain dialog, *side events*, dan training events. Dialog merupakan

program yang ditujukan untuk membahas berbagai kebijakan yang dapat direkomendasikan dalam implementasi *New Urban Agenda (NUA)*. *Side events* merupakan kegiatan yang mengambil topik tertentu dengan fokus pada *best practice* antar institusi, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan *training events* merupakan program yang dikhususkan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan peserta terkait pembangunan perkotaan berkelanjutan.

Dalam rangkaian acara pembukaan WUF 9, *Executive Director UN-Habitat Maimunah Mohd Sharif* mengatakan, kota di masa yang akan datang perlu memenuhi keberagaman dan mengutamakan inklusivitas. Pembangunan perkotaan seharusnya tidak meninggalkan seorangpun, baik dari sisi gender, usia, kemampuan fisik, dan kebangsaan atau status warga negara seseorang.

"Jika kita ingin memiliki kesempatan untuk mencapai SDGs, kita harus menata kota dengan benar", tutur Maimunah Mohd Sharif.

Dijelaskannya, perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan pengelolaan urbanisasi yang baik merupakan alat untuk pelaksanaan pembangunan yang





akan berdampak positif tidak hanya bagi kota, tetapi juga desa, antar daerah, dan negara.

“Tujuan kita adalah kota yang inklusif, aman, tangguh, dan permukiman yang berkelanjutan bagi semua. NUA adalah jalan untuk mewujudkannya”, tutupnya.

Sementara, Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sri Hartoyo menjelaskan, saat ini Presiden RI Joko Widodo mendorong pembangunan infrastruktur untuk menaikkan ekonomi. Hal tersebut dituangkan melalui pembangunan konektivitas, penyediaan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat seperti air minum, sanitasi, dan penanganan kawasan kumuh.

“Semuanya dalam rangka mewujudkan permukiman yang lebih layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun upaya tersebut perlu didukung dengan faktor *ownership*, artinya masyarakat juga ikut memiliki dan bertanggung jawab dalam pengelolaan,” kata Sri Hartoyo.

Lebih lanjut Sri Hartoyo menjelaskan, prinsip NUA antara lain memberikan kesempatan seluruh pihak untuk berpartisipasi pada pembangunan ekonomi perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan, melibatkan semua orang dengan artian semua orang dapat mengakses infrastruktur fisik dan sosial, layanan dasar, perumahan yang layak dan terjangkau, serta mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

“Pembangunan perkotaan di Indonesia seharusnya bisa sekaligus menciptakan pengurangan kemiskinan, lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan, sehingga fenomena seperti tenaga kerja yang sangat marginal itu bisa dikurangi melalui pembangunan perkotaan yang lebih baik,” ungkap Sri Hartoyo.

Menurut Sri Hartoyo, pembangunan infrastruktur di Indonesia memiliki titik berat kepada upaya pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan disparitas atau kesenjangan. Hal tersebut dapat ditangani melalui pembangunan infrastruktur permukiman bersifat padat karya seperti Pamsimas, Sanimas, pembangunan TPS 3R, PISEW, KOTAKU,



## Pemerintah Daerah didorong untuk merumuskan proposal agar dapat menerima pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur wilayah.

pembangunan irigasi kecil, dan perumahan swadaya. Selain itu, dalam mengatasi kesenjangan Ditjen Cipta Karya telah membangun PLBN, pengembangan infrastruktur permukiman di pulau kecil terluar dan kawasan perbatasan, serta daerah terpencil lainnya.

“Pola pemberdayaan masyarakat harus dikedepankan, dan pembangunan harus dilakukan secara inklusif atau melibatkan semua pihak” tegas Sri Hartoyo.

Sementara, pada kesempatan tersebut Menteri PPN/Bappenas Prof. Bambang Brodjonegoro berpartisipasi menjadi salah satu panelis dan menyampaikan gagasan Indonesia dalam mengimplementasikan NUA untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Menteri PPN/Bappenas menyampaikan bahwa tantangan utama dari permasalahan perkotaan di Indonesia adalah laju urbanisasi yang cepat. Tantangan tersebut direspon dengan adanya Rencana Kerja Pemerintah di setiap tahunnya yang disesuaikan dengan rencana aksi dari SDGs. Hal ini menjadi krusial mengingat akan adanya 500 lebih Pemerintah Daerah

yang melaksanakan program dan mengacu kepada rencana kerja pemerintah tersebut.

Dalam meratifikasi dokumen NUA di Indonesia, pada tahun 2016 Indonesia telah mentranslasi dokumen tersebut ke dalam Bahasa Indonesia dan KPPN/Bappenas telah mengadakan rangkaian sosialisasi untuk dapat merumuskan rencana aksi lokal dalam mengimplementasikan NUA. Langkah ini perlu didukung dengan meningkatkan kualitas rencana dan mengaitkan dengan rencana spasial agar visi dari kota dapat tercapai.

Di samping itu, keterikatan antar daerah atau provinsi juga menjadi penting dalam upaya perwujudan NUA. Pemerintah Daerah didorong untuk merumuskan proposal agar dapat menerima pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur wilayah. Dalam dua tahun ke depan, di tingkat regional akan ada upaya konsolidasi dalam mengintegrasikan NUA dan juga SDGs ke dalam peraturan perencanaan sampai ke tingkat lokal.

Selain itu juga diperlukan dukungan dari global dalam bentuk skema pembiayaan berupa donor dalam rangka mencapai tujuan NUA. **(Teks:redaksi)**

# PAVILIUN INDONESIA TAMPILKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN



Indonesia ikut berpartisipasi dalam kegiatan pameran *The Ninth World Urban Forum* (WUF 9) selama 7 hari (07-13/02/2018).

Paviliun Indonesia menjadi sarana untuk berbagai upaya dan capaian yang diraih oleh Indonesia dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan, juga merupakan sarana promosi praktik dan peran terbaik masing-masing organisasi yang terlibat dalam proses pembangunan perkotaan yang berkelanjutan di Indonesia.

WUF 9 ini merupakan forum sesi pertama yang akan fokus membahas implementasi *New Urban Agenda* (NUA) sejak diadopsi pada Konferensi Habitat III di Quito, Oktober 2016 lalu.

Dalam WUF 9 tersebut digarispawahi perkembangan kawasan perkotaan yang pesat. Hal ini menjadi tantangan mengingat isu perkotaan yang secara langsung muncul akibat perkembangan tersebut. NUA atau Agenda Baru Perkotaan merupakan komitmen global dan kerangka kerja yang menyusun bagaimana perkotaan harus direncanakan dan dikelola agar mampu mendukung urbanisasi yang berkelanjutan.

Selain itu, pelaksanaan pameran ini memberikan peluang kepada Indonesia untuk menampilkan program, inisiatif, kemitraan, dan solusi dalam pembangunan perkotaan.

Paviliun Indonesia mengangkat tema *Addressing Regional Disparity Through Poverty Alleviation and Job Creation*, dan mengadopsi perpaduan budaya Indonesia seperti Jawa, Bali, dan Sumatera Utara sebagai konsep utama Paviliun Indonesia. Lahan seluas 72 m<sup>2</sup> ini mampu menarik perhatian pengunjungnya, hal ini terlihat dengan ramainya Paviliun Indonesia.

Selain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), berbagai

*stakeholders* ikut berpartisipasi seperti Kementerian/Lembaga, Pemerintah Kabupaten/Kota, Universitas, dan *Non Government Organization* (NGO).

Saat pameran, Paviliun Indonesia mendapat respon positif dari negara lain. Selain itu, sebagai bentuk promosi wisata Indonesia, penjaga pameran menggunakan pakaian adat Indonesia, serta membagikan makanan khas Indonesia sebagai suvenir.







Indonesia menjadi salah satu negara yang berkontribusi aktif pada forum ini, dengan berpartisipasi pada kegiatan antara lain *networking event*, *training event*, *side event*, *urban library*, dan dialog yang diikuti oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, organisasi, perguruan tinggi, dan perusahaan swasta. Banyak hal yang akan dipaparkan dalam berbagai *event* WUF 9 tersebut, namun diharapkan materi yang disampaikan selaras dengan tema yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan. Untuk itu diadakanlah pertemuan kaukus *Indonesian Participants*, yang bertujuan untuk menciptakan sinergi antar *stakeholder* yang terlibat dalam WUF 9, sehingga diharapkan dapat menyampaikan pembelajaran Indonesia dalam membangun perkotaan sesuai NUA.

*Mini talkshow* merupakan sebuah forum diskusi yang diselenggarakan di Paviliun Indonesia dan terdiri dari 4 sesi setiap harinya selama pameran ber-

Pameran tersebut bertujuan untuk menyediakan peluang kepada Indonesia untuk memamerkan program, inisiatif, kemitraan, dan solusi dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

langsung. Forum ini menjadi wadah bagi seluruh perwakilan Indonesia untuk berbagi ide, saran, dan *best practices* dalam pembangunan perkotaan.

Topik yang diangkat pada acara *mini talkshow* ini antara lain *resilience city* pasca tsunami Aceh, program Indonesia terkait penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, kebijakan Indonesia terkait penyediaan perumahan yang terjangkau, pembangunan infrastruktur

pendukung Asian Games 2018, dan perwujudan kota hijau di Indonesia.

Kegiatan ini dibawakan secara santai dan interaktif sehingga peserta diskusi dari negara lain juga turut memberikan respon positif dengan aktif menanggapi dan bertanya. Pada sisi lain kegiatan *mini talkshow* juga diselingi dengan hiburan seperti menyanyikan lagu-lagu daerah dan tarian khas Indonesia.

(Teks: Indah ER/redaksi)

# CIPTA KARYA MANFAATKAN SPAM *IDLE CAPACITY* DI KABUPATEN BANGKA BARAT

Demi memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat di Kabupaten Bangka Barat, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) Provinsi Bangka Belitung, melakukan pemanfaatan *Idle Capacity* Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Tempilang dan Desa Rukam Kabupaten Bangka Barat.



**P**ekerjaan tersebut meliputi penyediaan pipa transmisi, dan jembatan intake, pengadaan/pemasangan

panel pompa intake, pembersihan, perbaikan dan pengecatan IPA, *reservoir*, rumah operasional, serta pekerjaan per-

pipaan 100 mm berikut aksesoris lengkap.

“Dengan adanya proyek pemanfaatan *Idle Capacity* SPAM ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan air bersih dan dapat menambah cakupan pelayanan PDAM di wilayah Kabupaten Bangka Barat khususnya Desa Tempilang dan Desa Rukam,” harap Kasatker PSPAM Provinsi Babel Abdilah saat kunjungan lapangan ke IKK Desa Tempilang dan Desa Rukam, Jumat (09/02/2018).

Kunjungan lapangan Kasatker PSPAM dilakukan untuk mengevaluasi seluruh kegiatan proyek PSPAM yang dikerjakan di Kabupaten Bangka Barat tahun 2017. “Alhamdulillah pemanfaatan *Idle Capacity* di Kabupaten Bangka Barat ini sesuai dengan yang diharapkan,” lanjut Abdilah. (Teks: vins/rndbabel/ari)







## PRESIDEN RI KUNJUNGI KEGIATAN PADAT KARYA DI PROVINSI SULSEL

Setelah melakukan kunjungan program padat karya di Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Maluku, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga melakukan kunjungan ke Provinsi Sulawesi Selatan.

**D**alam kunjungannya kali ini, Presiden Joko Widodo mengunjungi pelaksanaan kegiatan padat karya di Desa Panyakalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Kamis (15/02/2018) di Gowa.

Joko Widodo menjelaskan, program padat karya ini dilaksanakan di beberapa provinsi di Indonesia. Khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan padat karya mandiri tunai ini dilaksanakan sebanyak 883 kegiatan seperti ini, diantaranya berupa Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), perbaikan jalan inpeksi persawahan atau Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), pemeliharaan jalan nasional, serta peningkatan kualitas rumah layak huni.

“Kegiatan ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, dananya juga dikelola langsung oleh masyarakat. Setelah saya melakukan tanya jawab langsung dengan para pekerja, untuk pelaksanaan kegiatan ini upah tukang sebanyak Rp. 125.000 dan buruh Rp.85.000 perhari standar upah ini, khusus di Kabupaten Gowa, belum tentu sama di provinsi lain atau di Kabupaten lain,” tutur Jokowi.

Lanjut Presiden Joko Widodo, dengan kegiatan seperti ini diharapkan taraf hidup masyarakat perdesaan menjadi lebih baik karena jaringan atau saluran sekundernya pada pengairan sudah bagus, tersiernya juga sudah baik, jalan inspeksinya sudah mantap, maka diharapkan peningkatan produksi pangan akan lebih baik dan dapat ditingkatkan lagi.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang didampingi oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permu-

Kementerian Desa dan Kementerian PUPR,” kata Basuki.

Untuk di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri ada jaringan irigasi yang terdapat di 38 lokasi, jalan produksi 64 lokasi atau kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 34,8 miliar untuk program PISEW. “Dan untuk Kabupaten Gowa sendiri ada 3 lokasi dan salah satunya Desa Panyakalang, dan untuk pengelola kegiatan ini harus memiliki pendamping yang memiliki badan hukum karena dia yang akan mengelola alokasi dananya

**Untuk di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri ada jaringan irigasi yang terdapat di 38 lokasi, jalan produksi 64 lokasi atau kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 34,8 miliar untuk program PISEW.**

kiman Ditjen Cipta Karya Rina Farida menambahkan, kegiatan padat karya tunai ini terdapat pada 900 lokasi di Indonesia, yang tidak hanya dilaksanakan di Kementerian PUPR saja tetapi juga ada di Kementerian Desa, Kementerian Perhubungan, Kementerian KKP, dan Kementerian Pertanian. “Dan untuk sementara yang sedang berjalan yaitu di

sesuai kebutuhan, kalau di kelompok masyarakat desa biasanya disebut faskel,” ungkap Basuki.

Kegiatan padat karya yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan ini melibatkan semua bidang seperti Ditjen Cipta karya, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Binamarga dan Ditjen Penyediaan Perumahan. **(Teks: Jml Randal Sulsel/ari)**

# CIPTA KARYA GANDENG 58 KEPALA DAERAH WUJUDKAN 100% AKSES SANITASI LAYAK 2019



Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Cipta Karya yang diwakili oleh Direktur PPLP Dodi Krispratmadi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 58 Kepala Daerah, dengan pembicara di antaranya Staf Ahli Dirjen Cipta Karya Sjukrul Amin, serta Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Cipta Karya Mardi Parnowiyoto.

Dodi mengungkapkan, sosialisasi dan penandatanganan PKS ini dimaksudkan untuk mendukung komitmen bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pembagian hak dan kewajiban terhadap penyelenggaraan infrastruktur penyehatan lingkungan permukiman sehingga pelaksanaan program menjadi lebih sinergis, efektif, dan berkelanjutan.

“Peran dan fungsi masing-masing pihak dalam penyelenggaraan infrastruktur penyehatan lingkungan permukiman ini diwujudkan dalam PKS yang ditandatangani oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dengan Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota),” kata Dodi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, telah diamanatkan untuk memenuhi target akses universal pada tahun 2019, yang meliputi 100%

akses aman air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak, atau yang biasa disebut Gerakan 100-0-100.

Dalam kaitannya dengan pencapaian target 100% akses sanitasi layak, Ditjen Cipta Karya melalui Direktorat PPLP melaksanakan pembangunan infrastruktur air limbah domestik, persampahan, dan drainase lingkungan baik skala komunal, skala kawasan permukiman, skala kota, hingga skala regional.

Dodi berharap, agar infrastruktur penyehatan lingkungan permukiman yang akan dibangun dapat berfungsi optimal dan berkelanjutan untuk peningkatan pelayanan sanitasi layak kepada masyarakat, dalam rangka untuk mewujudkan pemenuhan akses universal bidang sanitasi.

Dodi menambahkan, dalam proses perencanaan dan penganggaran pemba-

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang penyehatan lingkungan permukiman TA 2018 di kabupaten/kota, Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) mengadakan Sosialisasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyelenggaraan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman TA 2018 Wilayah Barat di Kota Padang, Rabu (14/02/2018).

ngunan infrastruktur sanitasi atau penyehatan lingkungan permukiman ini telah melibatkan unsur kabupaten/kota, provinsi, kementerian/lembaga terkait, dan melalui serangkaian tahapan sampai dengan pelaksanaan konstruksi dengan memperhatikan kriteria kesiapan (*readiness criteria*) dari masing-masing usulan kegiatan. (Teks: randal sumbar/rqh)





# PRESIDEN JOKOWI TINJAU PROGRAM KOTAKU DAN PISEW DI MALUKU

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan pelaksanaan program padat karya tunai Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Rabu (14/02/2018).

Selain mengunjungi Kelurahan Batu Merah, Jokowi juga mengunjungi lahan pertanian di kawasan Gempa Waimital yang berada di Pulau Seram Bagian Barat.

Dalam kesempatan ini Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono beserta Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo, Inspektur Jenderal Rildo Ananda Anwar, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja, dan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Rina Farida. Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Gubernur Maluku Said Assagaff.

Jokowi mengungkapkan program ini memiliki manfaat bagi masyarakat di perdesaan dan daerah terpencil. Karena program padat karya tunai membuka lapangan kerja bagi masyarakat. "Dengan cara yang sangat produktif ini, kita ingin perbaikan jalan penghubung di daerah persawahan. Sehingga kita harapkan ada manfaat yang tidak hanya satu, dua, tiga, tetapi banyak manfaatnya dari program ini," ucap Jokowi.

Jokowi berharap distribusi anggaran ke daerah bisa langsung dirasakan oleh masyarakat langsung. "Agar distribusi anggaran ke daerah, langsung masuk ke rakyat hingga tingkat daya beli bisa naik," tandas Jokowi.

Di lokasi tersebut Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR melakukan pembangunan jalan permukiman rabat beton sepanjang 2,5 km dengan nilai Rp. 860 juta dan pembangunan saluran drainase sepanjang 350 meter dengan biaya Rp. 242 juta melalui alokasi anggaran tahun 2018. Sebagian pekerjaan jalan sudah dapat diselesaikan dan dirasakan manfaatnya dimana se-

belumnya jalan masih berupa tanah yang sulit dilewati apabila terjadi hujan. Masyarakat setempat yang melakukan pekerjaan dalam kegiatan tersebut per harinya berjumlah 28-30 orang. Untuk tukang mendapatkan upah sebesar Rp. 120 ribu/hari dan pekerja sebesar Rp. 100 ribu/hari selama 3 bulan.

"Program KOTAKU merupakan program kolaborasi. Tidak hanya Pemerintah Pusat, tetapi juga melibatkan Pemerintah Daerah dan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya. Kalau masyarakat tidak dilibatkan maka kawasan yang sudah ditata akan kembali kumuh," kata Basuki.

Capaian Kementerian PUPR tahun 2017 di bidang infrastruktur permukiman yakni pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dari target 4.997 liter/detik tercapai 4.832 liter/detik, penanganan kawasan kumuh dengan target 1.058 hektar tercapai 5.961 hektar, dan infrastruktur sanitasi persampahan dari target menjangkau 2,8 juta KK (Kepala Keluarga) tercapai 2,6 juta KK.

Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp. 11,28 triliun untuk program padat karya tunai. Program tersebut yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), Operasi dan Pemeliharaan (OP) irigasi, Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), pembangunan rumah swadaya maupun rusun dan rumah tapak untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.

Alokasi anggaran padat karya di Provinsi Maluku melalui P3-TGAI di 55 lokasi yang ada di 4 kabupaten sebesar Rp. 12,73 miliar, pemeliharaan jalan nasional sepanjang 1.772 km sebesar Rp. 32,1 miliar, PISEW di 21 lokasi yang berada di 6 kabupaten sebesar Rp. 12,6 miliar, dan KOTAKU di 24 kelurahan pada 3 kabupaten/kota sebesar Rp. 13,7 miliar. (Teks: RRA-Randal Maluku/ari)



# ATASI PENCEMARAN AIR BERSIH DI TANJUNG JABUNG TIMUR



Satuan Kerja PSPLP Provinsi Jambi turut mengatasi masalah pencemaran air bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kecamatan Muaro Sabak Barat yang berdekatan dengan TPA Parir Culum Muaro Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**K**epala Satuan Kerja PSPLP Provinsi Jambi Eka Prasetya menjelaskan bahwa pola hidup masyarakat di Tanjung Jabung Timur selama ini masih sangat memprihatinkan karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah dan buang air besar ke sungai. Hal ini akan mencemari air sungai dan air tanah, maka Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya membangun IPLT untuk menampung dan mengolah kembali limbah tinja di Kecamatan Muaro Sabak Barat.

“Pembangunan IPLT di Tanjung Jabung Timur bertujuan untuk mengelola lumpur tinja yang berasal dari sistem pembuangan lumpur tinja setempat, kemudian diangkut dengan sarana pengangkut lumpur tinja kapasitas 4 m<sup>3</sup>/hari.

Kemudian setelah lumpur tinja kering, air olahan yang sudah aman tersebut akan dibuang ke badan air. IPLT ini mencakup 3 wilayah pelayanannya yaitu Kecamatan Muaro Sabak Barat, Geragai,

dan Muaro Sabak Timur. Lokasi pembangunan IPLT berjarak 3 hingga 20 km dari permukiman warga,” Jelas Eka.

Eka berharap semoga dengan dibangunnya IPLT di Tanjung Jabung Timur dapat membantu dan mengatasi pencemaran air bersih yang terjadi selama ini sehingga kualitas air di Tanjung Jabung Timur dapat menjadi lebih baik dan terhindar dari pencemaran akibat limbah rumah tangga. **(Teks: DM/Randal/Jambi/ari)**





# TPS 3R KSM BANTAS LESTARI, SEMANGAT WANITA UNTUK MENGOLAH SAMPAH MENJADI BERKAH

Putrisetyati Hasanah \*)

Program Tempat Pengolahan Sampah Berbasis *Reduce*, *Reuse*, *Recycle* atau yang sering disebut TPS 3R merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan pada skala komunal atau kawasan dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat termasuk yang berpenghasilan rendah atau yang tinggal di permukiman padat dan kumuh.



**P**enanganan sampah dengan pendekatan infrastruktur TPS 3R lebih menekankan kepada cara pengurangan, pemanfaatan, dan pengolahan sejak dari sumbernya pada skala komunal (area permukiman, area komersial, area perkantoran, area pendidikan, area wisata, dan lain-lain).

Jika kita melihat TPS 3R dibangun untuk mengatasi pengelolaan sampah di daerah masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengedepankan konsep *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang). Terdapat satu contoh unik dalam pengelolaan TPS 3R yang berada di Desa Bantas, Kabupaten Tabanan, Bali. Jika kita melihat suatu pengurus organisasi



TPS 3R di beberapa tempat terdiri dari pria dan wanita, tapi berbeda dengan TPS 3R kali ini. Digagas oleh ketua yang merupakan penggerak, kemudian TPS 3R ini berdiri dan diketuai oleh wanita yang kuat dan mempunyai andil besar terhadap masyarakat, yaitu Ni Nyoman Sarasmini.

TPS 3R KSM Bantas Lestari berada di Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Desa Bantas memiliki luas wilayah 239 ha, dengan total jumlah penduduk per April tahun 2017 adalah 3.364 jiwa yang terbagi dalam 994 KK. Dengan jumlah penduduk laki-laki 1.690 jiwa, dan perempuan 1.674 jiwa. KSM Bantas Lestari melayani 571 KK dengan 2.620 Jiwa. TPS 3R ini melakukan pendekatan penanggulangan sampah dari kegiatan kampanye dan edukasi sampah. Pendekatan dilakukan dengan sosialisasi kepada arisan yang terdapat pada ibu-ibu PKK di Desa Bantas. Selain itu, ketua KSM Bantas Lestari juga aktif melakukan edukasi kepada Posyandu yang ada di Desa Bantas, bahkan pada kegiatan kelompok Dasa Wisma.

Sebagai ketua yang juga aktif dalam kegiatan di masyarakat, Ni Nyoman Sarasmini lebih mengedepankan sosialisasi penanggulangan sampah mulai dari sumber. Edukasi dilakukan kepada ibu-ibu, mulai dari bagaimana membuat



pengelolaan sampah dari rumah, dan dipilah dengan benar. Visi dan misi yang diusung oleh KSM Bantas Lestari adalah menyediakan infrastruktur TPS yang memadai di Desa Bantas dengan pola pendekatan 3R yang sanggup dikelola dengan baik oleh masyarakat, untuk menjadikan TPS 3R yang mandiri dan berkelanjutan sesuai dengan harapan masyarakat, dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman (mengurangi jumlah timbunan sampah rumah tangga)

dan derajat kesehatan masyarakat Desa Bantas, mengurangi biaya transportasi sampah, menghemat umur TPA Mandung, serta menyerap tenaga kerja.

Hingga saat ini, TPS 3R Bantas Lestari sudah melakukan kegiatan mulai dari pembuatan kerajinan tangan yang unik dan bertemakan Bali modern hingga melakukan pembibitan dengan menggunakan kompos yang dihasilkan dari pengolahan sampah di TPS 3R KSM Bantas Lestari. Penghasilan yang diperoleh sudah dapat membantu ekonomi di sekitar Desa Bantas, dan menarik minat wisatawan untuk melihat kerajinan tangan yang terbuat dari olahan sampah.

Penanggulangan sampah juga sudah menimbulkan hasil yang signifikan, dari berkurangnya pengidap penyakit diare dan demam berdarah, hingga lingkungan desa yang semakin bersih. Di sisi lain, TPS 3R KSM Bantas Lestari juga melakukan kerja sama yang baik dengan Dinas Lingkungan Hidup dan juga perangkat desa lainnya, sehingga untuk pembangunan berkelanjutan akan terus berjalan.



*\*) Penulis adalah staf publikasi Penyehatan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat (PLPBM) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*





# CEGAH SAMPAH MASUK KE LAUT!

Reza Fahrurrozi \*)

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau dan luas wilayah laut mencapai 64,97% dari total wilayah Indonesia, dimana total wilayah daratan seluas 1.910.931,32 km<sup>2</sup> dan luas lautan seluas 3.544.743,9 km<sup>2</sup>.

**D**engan besaran luas wilayah laut tersebut, maka penanganan sampah yang tidak terkelola dengan baik, sangat mungkin terhanyutkan ke saluran air, sungai, dan bukanlah tidak mungkin akan terbawa hingga ke laut. Selain itu, adanya berbagai aktivitas di laut seperti perikanan, penambangan lepas pantai, transportasi laut, dan permukiman di pulau-pulau kecil juga berpotensi

sebagai sumber sampah. Sehingga sistem pengelolaan sampah juga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, agar laut kita tetap lestari dan bebas dari sampah.

## **Sampah Plastik yang Mendominasi Sampah di Laut**

Jika kita berenang di tepi pantai atau pergi memancing di laut, seringkali kita menemukan sampah yang tidak terkelola

di daratan dan berakhir di laut. Pada sejumlah kawasan pariwisata seperti pantai, acap kali dijumpai wadah sampah yang jumlahnya terbatas serta lokasinya berjauhan. Frekuensi pengumpulan sampah dari wadah sampah yang sangat jarang, hingga pembakaran sampah dilakukan secara sembarangan.

Hal ini tentu saja menyebabkan minat wisatawan untuk datang ke ka-



wasan pariwisata tersebut menjadi enggan untuk tinggal lebih lama. Selain tidak elok secara estetika, para wisatawan juga mempertimbangkan aspek higienis yang buruk dari tempat tersebut. Ini dapat berdampak terhadap semakin menurunnya daya tarik wisatawan ke kawasan pariwisata tersebut, sehingga akan mematikan potensi ekonomi lokal untuk berkembang.

Adapun jenis sampah yang sering dijumpai di kawasan pantai adalah sampah plastik. Plastik memiliki keistimewaan karakteristik, di antaranya adalah harga yang relatif murah, bobotnya ringan, kuat, tahan lama, tahan korosi, tahan panas, dan sebagai insulator listrik yang baik. Berbagai keuntungan tersebut telah merevolusi pola hidup manusia, yang menjadi sangat gemar dalam menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari.

Namun yang perlu diketahui bersama bahwa plastik apabila sudah tidak terpakai dan menjadi sampah plastik, serta terbuang secara tidak sengaja ke laut, maka sampah plastik akan ber-

tahan di lautan dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan lebih lama dari reratausia manusia bertahan hidup. Sampah plastik ini akan terkumpul dalam satu area di tengah laut, yaitu area yang terus-menerus menimbulkan pusaran air polusi, serta berdampak pada kerusakan ekosistem hingga lebih dari 100 tahun.

Dampak lain yang muncul adalah terkonsumsinya sampah plastik secara tidak sengaja oleh biota laut, yang mungkin saja akan memasuki piramida makanan, hingga pada akhirnya mencapai puncak piramida. Bukanlah suatu hal yang tidak mungkin bahwa manusia adalah konsumen di puncak piramida makanan tersebut, yang tentunya akan sangat membahayakan kesehatan manusia.

#### Cegah Sampah Memasuki Laut

Aksi nyata Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, mutlak dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan sampah yang memasuki laut, demi mewujudkan laut bebas sampah. Salah satu target yang ditetapkan adalah sebesar 70% sampah plastik berkurang dari

laut Indonesia pada tahun 2025.

Namun demikian, untuk mewujudkan Indonesia Bebas Sampah Tahun 2020 dan Lautku Bebas Sampah Plastik Tahun 2025, maka dibutuhkan suatu kolaborasi yang erat antar instansi secara terintegrasi. Sampah yang telah hanyut ke laut akan sulit untuk dicegah dan dibersihkan. Oleh karenanya, upaya untuk mencegah sampah memasuki laut menjadi hal yang sangat penting untuk diimplementasikan.

Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memfasilitasi melalui penyediaan infrastruktur pengolahan (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* atau TPS 3R berbasis masyarakat, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/TPST berbasis institusi, dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah sebagai infrastruktur yang akan mereduksi volume sampah dan memroses akhirnya sebagai residu di TPA sampah, serta upaya mobilisasi sampah sebagai polutan. Melalui penanganan sampah di darat ini pulalah, maka akan tercegah sampah untuk memasuki laut.

Kesadaran segenap pihak untuk mengelola sampah di sumber sampah, serta mendorong pengolahan dan pemrosesan akhir sampah secara tuntas di darat, maka secara signifikan telah mereduksi volume sampah yang tidak tertangani, sehingga tidak berhilir di laut. Penyelesaian secara sporadis di laut akan sangat sulit untuk dilaksanakan, mengingat luasnya wilayah laut kita. Oleh karenanya, mari kita cegah sampah masuk ke laut dengan senantiasa membuang sampah pada tempatnya, serta mendorong pemerintah dalam meningkatkan penanganan sampah di darat yang harus berakhir pada TPS 3R/TPST, serta pemrosesan akhir di TPA sampah secara berwawasan lingkungan.

*\*) Penulis adalah staf fungsional (sektor persampahan) pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Strategis, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kontak dengan penulis: extreme\_reza@yahoo.com*



# PARTISIPASI AKTIF PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Indah Hapsari \*)

*The Ninth Session of World Urban Forum (WUF 9)* merupakan kegiatan terbesar pertama mengenai pembangunan perkotaan yang dilaksanakan setelah pengadopsian *New Urban Agenda (NUA)*.



WUF 9 menjadi kegiatan pertama yang fokus kepada implementasi NUA dengan memberikan masukan substansial dan instrumental terhadap laporan implementasi NUA yang akan dikirimkan kepada ECOSOC pada Juli 2018. Forum ini memberikan

kontribusi terhadap mobilisasi secara global dan advokasi terhadap visi utama pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan pencapaian agenda 2030, serta *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

WUF 9 menjadi forum bagi berbagai pemangku kepentingan termasuk pemu-

da dalam memberikan masukan terhadap implementasi NUA. Pemuda memiliki potensi untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan sebagai agen perubahan dalam komunitas dan masyarakat. Dengan keahlian dan sudut pandang yang unik dan berbeda terhadap dunia, pemuda

menjadi titik terdepan dari inovasi dan kepemimpinan masa depan. Partisipasi pemuda dalam pembangunan (perencanaan, implementasi, *monitoring* hingga evaluasi) terhadap kebijakan perkotaan akan meningkatkan inklusifitas pemerintahan perkotaan, memastikan kelestarian lingkungan perkotaan dan membawa kota kepada pendekatan inovasi dan kewirausahaan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk melibatkan pemuda secara aktif dalam mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan di Indonesia. Komitmen ini tercermin dalam berbagai bentuk pengikutsertaan aktif pemuda dalam berbagai proses penyusunan NUA, melalui APUFY 2015, APUF 6, *Asia Pacific Regional Meeting*, dan PrepCom3. Selain itu Kementerian PUPR juga telah memastikan partisipasi aktif pemuda Indonesia dalam WUF 9. Dengan partisipasi aktif ini diharapkan pemuda secara langsung terlibat dalam memberikan masukan terkait implementasi NUA di level internasional, dan terdorong untuk ikut serta mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan dan implementasi NUA di Indonesia.

Para pemuda yang menjadi peserta merupakan 3 orang alumni *Asia Pacific Urban Youth Assembly (APUFY)* 2015 yang telah dipilih berdasarkan proses seleksi dan dianggap memahami substansi NUA, serta telah berkontribusi aktif dalam

proses persiapan NUA. Para peserta ini dipilih dari beragam latar belakang pendidikan, profesi, dan peran nyata mereka dalam pembangunan perkotaan di komunitasnya masing-masing.

### **Children and Youth Assembly**

WUF 9 diawali dengan dilaksanakannya *Assembly* yang terdiri atas *Children and Youth Assembly*, *Woman Assembly*, dan *Business Assembly*. Pembukaan *Assembly* dilakukan di *Plenary Hall* KLCC yang dimulai pada pukul 10.00 waktu Kuala Lumpur. Moderator pada pembukaan ini yaitu Kimberly Leonard (*Sky News Presenter*). Moderator memulai sambutannya kepada seluruh peserta yang hadir dengan menyatakan bahwa semua yang hadir pada WUF 9 memiliki tujuan yang sama yaitu membantu meningkatkan martabat hidup manusia dan untuk menyelamatkan bumi.

*The Children and Youth Assembly* dibuka dengan pesan video dari Presiden *World Assembly of Youth* Idris Haron, yang menyerukan keikutsertaan pemuda dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, dan dilanjutkan dengan pesan video dari Sekretaris Jenderal *World Youth Assembly* yang menyerukan untuk memastikan kesempatan bagi pemuda, pemberdayaan pemuda, dan memastikan dukungan NUA untuk mencapai SDGs.

Dalam *Children and Youth Assembly* ini para pemuda Indonesia berperan aktif pada berbagai *working group* yang dipilih. Dari berbagai topik, peserta mengajukan

berbagai proposal yang menguntungkan bagi anak-anak dan pemuda perkotaan termasuk memastikan mereka memiliki kesempatan di area non perkotaan.

Sedangkan dalam *Dragon's Den for Youth Project* yang merupakan bagian dari *Children and Youth Assembly*, setiap kelompok pemuda mempresentasikan proyek terkait permasalahan kota kepada panel ahli. Beberapa kelompok mengangkat proyek terkait manajemen sampah, kekurangan ruang publik, akses kepada pendidikan berkualitas, polusi udara, kurangnya rumah terjangkau, dan meningkatkan gambaran positif terhadap energi nuklir.

Pada sesi penutupan *Assembly*, Aisa Kirabo Kacyira dari UN Habitat menyoroti peran pemuda dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Aisa mendesak pemuda untuk mengubah keinginan menjadi tindakan nyata, dengan menyatakan bahwa "*hope is not sufficient without strategy*". Aisa merekomendasikan perencanaan strategis dan monitoring, dan mengingatkan bahwa berbagai usaha tidak boleh lepas dari keberadaan *grassroot*. Aisa menyimpulkan bahwa dengan mendorong pemuda untuk memegang peran dalam kepemimpinan dan untuk memastikan tanggung jawab pemimpin lainnya.

Massa Almously sebagai perwakilan anak-anak dan pemuda menyerukan keikutsertaan aktif pemuda pada semua tahap pembuatan keputusan dalam pembangunan perkotaan. Mereka mendesak perubahan paradigma dari pertumbuhan yang berpusat pada satu orang kepada pertumbuhan yang berpusat pada planet dengan hak asasi manusia dan keadilan sebagai inti. Massa juga menekankan bahwa pemuda merupakan bagian dari solusi pembangunan, dan oleh karena itu harus terdapat mekanisme yang memastikan pemuda untuk dapat memimpin dalam pembangunan. Empat pilar penting keberadaan pemuda yaitu perlunya respon terhadap kebutuhan pemuda, dorongan kepada pemuda dalam membuat keputusan, adanya garansi bagi pemuda dalam politik, partisipasi aktif pemuda, dan pentingnya merestorasi harapan di masa sekarang bukan masa depan.





### Peran Nyata Pemuda Indonesia dalam Pembangunan Perkotaan

Dalam WUF 9 ini pemuda Indonesia sangat antusias mengikuti berbagai sesi yang dibuka, antara lain *side events*, *training events*, *networking events*, *special session*, dan *stakeholder roundtable*. Dalam kegiatan yang diikuti lebih dari 22 ribu orang dari 165 negara tersebut, para pemuda banyak mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru dalam pembangunan perkotaan dengan saling berbagi informasi, pengetahuan, *best practices*, teknik dan pendekatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan perkotaan, hingga membuka kesempatan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan banyak *stakeholder* pembangunan perkotaan.

Dalam kesempatan mengisi acara *mini talkshow* di area Paviliun Indonesia, para pemuda Indonesia ini menyampaikan berbagai peran nyata mereka dalam mengurangi kesenjangan pembangunan desa-kota. Contohnya yang dilakukan oleh salah satu peserta yaitu Yaumil Masri yang berasal dari Donggala-Sulawesi Tengah. Pasca APUFY 2015 Yaumil memulai inisiasinya dengan mendirikan Sikola Pomore, sebuah sekolah bagi anak-anak usia dini yang berbasis alam, Bahasa Inggris, dan kebudayaan lokal. Yaumil berkeyakinan dengan pendidikan anak-anak yang lebih baik, ke depan angka kemiskinan di daerah tersebut dapat dikurangi dan mendidik anak-anak untuk nantinya berkontribusi terhadap pembangunan di daerahnya.

#### Rekomendasi Pemuda untuk Pembangunan Perkotaan yang Berkelanjutan di Indonesia

Dari berbagai sesi yang diikuti dalam WUF 9, pemuda Indonesia memberikan rekomendasinya kepada Pemerintah Indonesia demi pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Di antaranya adalah pemuda mendorong perlu dibentuknya dewan anak dan pemuda sebagai wadah untuk menyampaikan suara pemuda mengenai pembangunan yang berkelanjutan. Dengan dibentuknya dewan ini akan memastikan suara pemuda memiliki kekuatan dan legalitas, sehingga tidak hanya dipandang sebagai pelengkap



Dari berbagai sesi yang diikuti dalam WUF 9, pemuda Indonesia memberikan rekomendasinya kepada Pemerintah Indonesia demi pembangunan perkotaan yang berkelanjutan di Indonesia.

dalam proses pembangunan. Selain itu, pemuda mendorong pemberian insentif terhadap berbagai inisiatif dan gerakan pemuda yang mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berperan dalam pengentasan kemiskinan.

Pemuda juga mendorong pemerintah untuk menetapkan formulasi kerangka implementasi SDGs dan NUA di semua level, termasuk indikator, standar baku mekanisme *monitoring* dan perolehan data, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan khususnya masyarakat/komunitas dan perguruan tinggi. Sehingga data yang diperoleh bukan sekedar angka, namun bisa menceritakan tingkat pencapaian SDGs dan NUA disertai bukti yang nyata (mengacu pada *Kuala Lumpur Declaration*).

Terkait isu semakin langkanya keterbatasan ruang terbuka publik, pemuda mengusulkan ditingkatkannya pembangunan ruang publik yang ramah bagi perempuan dan anak-anak, serta diadakannya kampanye publik untuk membuat lebih banyak masyarakat terutama pemuda dan anak-anak untuk mendatangi dan menghabiskan lebih

banyak waktu di ruang terbuka publik seperti taman kota untuk meningkatkan kepedulian masyarakat kota akan pentingnya keberadaan ruang terbuka publik di perkotaan.

Pemuda mendorong penerapan inovasi yang dapat meningkatkan kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung pembangunan perkotaan berkelanjutan, sebagai contoh pemanfaatan sampah perkotaan dengan basis *circular-built economy* melalui reproduksi material rendah karbon, serta regulasi yang tepat mengenai pemanfaatan ruang alternatif-alternatif untuk memenuhi kebutuhan ruang di masa mendatang.

Pemuda juga mendorong untuk dilaksanakannya Forum Perkotaan Nasional secara berkala sebagai wadah *monitoring* dan evaluasi implementasi NUA dan SDGs di Indonesia.

\*) Penulis adalah Kasi Analisa Teknis Subdit Perencanaan Teknis Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

# SIMPANLAH SAMPAH PADA TEMPATNYA, KARENA TERTIB SAMPAH DAPAT HASILKAN UANG

Ahmad Asnawi \*)



Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diperingati setiap tanggal 21 februari setiap tahun bukan sekedar kegiatan rutin seremonial tetapi Tuhan telah memperingatkan bahwa ada sampah, ada manusia. Bila sampah dibiarkan akan membahayakan manusia itu sendiri.

**M**engelola sampah harus serius dan profesional, apalagi petugas kebersihan yang bekerja di Pemerintah Daerah. Ada gaji, fasilitas, bahkan seragam. Cara kerja mestinya tidak kalah dengan petugas kebersihan di

mall dan kompleks perumahan elit yang hanya digaji dari perusahaan/konsumen.

Pertumbuhan penduduk yang meningkat membuat permukiman menjadi sempit. Dengan adanya komunitas pengrajin sampah bahkan kegiatan bazar

sampah serta penggiat lingkungan, seharusnya dapat dirangkul dan berkerja sama untuk kerja tim. Setelah Peraturan Undang-Undang, Peraturan Menteri, kemudian Peraturan Daerah (eksekutif bersama legislatif), dan ditindaklanjuti





dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati, ternyata belum dapat menyelesaikan masalah sampah, harus ada SOP (Standar Operasional Prosedur) terutama bagian pelayanan kebersihan, petugas kebersihan dan mobil angkut sampah.

Dalam kegiatan pengelolaan sampah, ada bagian regulator ada juga bagian operator. Regulator bertugas merencanakan pengelolaan sampah, mulai dari tempat timbulan sampah rumah tangga, pasar, pertokoan, dan lain-lain. Dari Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (TPSS), transfer dipo, dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS). Sedangkan operator tugasnya mengangkut sampah dari TPSS ke TPAS. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan masyarakat seperti RT/RW yang biasanya mengangkut sampah dari rumah ke TPSS.

Uniknya sampah, di satu sisi pelayanan dasar dan tugas pemerintah, dan di sisi lain Pemda mengambil retribusi / Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kebersihan. Ada beberapa model untuk retribusi kebersihan yang bisa diterapkan, seperti kerja sama dengan tempat wisata sehingga sampah jadi lebih tertib dan bersih melalui retribusi dengan parkir masuk tempat wisata, PLN, atau PDAM. Bahkan retribusi kebersihan pasar bisa dikoordinir bersama dengan petugas pasar.

Penulis pernah bertemu dengan tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa untuk sampah pasar kalau dipilah khusus sampah sayur dan buah bisa dibuat jus untuk suplemen ternak. Sedangkan sampah hotel dan rumah makan dapat dibuat untuk makanan binatang peliharaan.

Sementara bagaimana retribusi dengan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Biasanya karena tidak difasilitasi oleh pemerintah dan kurang sosialisasi maka sampah dibuang ke selokan, di pinggir jalan pada tanah tak bertuan bahkan ke sungai, terkadang warga membuang sampah menggunakan motor. Misalnya dapat dijelaskan untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah dikenakan retribusi Rp. 20 ribu per bulan. Iuran tersebut untuk 30 hari, dibagi 4 minggu menjadi Rp. 5.000 per minggu. Kalau seminggu 5 hari kerja, berarti cuma Rp. 1.000 per hari. Bandingkan dengan uang jajan anak per hari, jika anak sakit akan lebih besar lagi biaya yang dikeluarkan, karena sampah juga menjadi sumber penyakit bila tidak diolah.

Sampah yang dibuang sembarangan, ibarat rumah mewah tapi tidak ada toilet (WC). Berdasarkan pengalaman penulis, karena kurang sosialisasi terdapat desa yang membuat parit (saluran air) yang melewati tengah kampung supaya ketika hujan datang, tidak ada banjir. Parit selesai

maka warga buang sampah ke parit yang tidak ada air. Ketika hujan bukan hanya air yang mengalir, tetapi sampah pun terbawa arus, menuju sungai. Siapa yang salah? Masyarakat tidak diberi tahu tentang cara mengolah sampah supaya tidak membahayakan orang lain, tetapi ada manfaatnya untuk diri sendiri.

Ada berbagai macam cara mengolah sampah rumah tangga, mulai dari yang paling mudah dan sederhana sampai yang menghasilkan gas serta dapat dipakai untuk masak. Pemerintah Kabupaten/Kota ada yang berlindung di balik alasan seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM). Coba bandingkan, ketika ada anggaran, kita bisa membayar konsultan perencana untuk membuat perencanaan model pengelolaan sampah bahkan SOP pengangkutan sampah. Kemudian kita undang pelaksana untuk melaksanakan hasil perencanaan. Terakhir Pemda pun bisa membayar konsultan pengawas untuk *memonitor* hasil kerja tim pelaksana, sehingga sampah menjadi bersih dan bermanfaat. Sampah sebetulnya bisa menciptakan lapangan kerja dari mengolah sampah serta menjadikan lingkungan bersih dan bernilai ekonomi.

*\*) Penulis adalah Penggiat Lingkungan. Tinggal di Bandung Barat Jawa Barat.*

# SISI LAIN HASIL PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI BENGKULU

Memoden \*)



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam perannya mewujudkan bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur terus berupaya dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat.

**A**ntara lain dengan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, mewujudkan lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, dan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, serta pembangunan penyediaan air minum dan sanitasi yang diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Ditjen Cipta Karya melalui Satuan Kerja di Provinsi Bengkulu terus melakukan pembangunan dan standarisasi teknis terhadap pembangunan Provinsi Bengkulu sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan mampu memenuhi sasaran Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Cipta Karya 2015-2019. Melalui Program Revolusi Mental dilakukan pembangunan ruang terbuka publik di Kabupaten Rejang Lebong dan Kota Bengkulu. Untuk mewujudkan 100% akses air minum, kegiatan Pamsimas menjadi andalan dalam memenuhi kebutuhan air bersih di daerah perdesaan yang mengalami krisis air. Sementara untuk mewujudkan 100% akses sanitasi layak program Sanimas telah mampu mengubah wajah kawasan yang dahulunya tingkat Buang Air Besar

Sembarangan (BABS) tinggi menjadi kawasan yang nyaman, asri, maupun menjadi tempat bermain anak-anak. Di bidang penanganan kumuh, program KOTAKU telah mampu mengubah wajah kawasan kumuh menjadi kawasan yang layak huni.

Di samping mewujudkan Sasaran Renstra Ditjen Cipta Karya 2015-2019, pembangunan Ditjen Cipta Karya yang dilaksanakan di Provinsi Bengkulu memiliki nilai tambah untuk menunjang sektor lain seperti pariwisata, pendidikan, sosial budaya, dan perdagangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung

program Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menyukseskan Visit Wonderful Bengkulu 2020.

Selama tahun 2017, Satker di lingkungan Ditjen Cipta Karya Provinsi Bengkulu telah banyak mengubah kawasan yang dulunya terbengkalai dan kumuh menjadi objek wisata dan menunjang sentra perdagangan masyarakat. Selain itu, infrastruktur yang dibangun juga telah sukses dalam menyediakan sarana prasarana penunjang kawasan pariwisata dan mempublikasikan ikon Provinsi Bengkulu, yaitu Bunga Rafflesia





sehingga lebih dikenal oleh para wisatawan.

Di sektor penataan bangunan dan lingkungan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Pantai Berkas telah mampu mengubah kawasan yang dulunya hanya semak belukar dan menjadi tempat pembuangan sampah masyarakat menjadi Taman Hijau Kota yang menjadi primadona baru bagi masyarakat Kota Bengkulu. Taman yang terletak di kawasan Pantai Panjang tersebut setiap harinya selalu dikunjungi wisatawan baik dari dalam maupun luar Kota Bengkulu. Taman yang banyak ditumbuhi oleh pohon cemara yang menjulang tinggi selain mampu memberikan rasa teduh bagi pengunjung tersebut, juga menyediakan fasilitas taman bermain bagi anak-anak dan fasilitas olahraga seperti peralatan fitness serta arena *skateboard*. Pembangunan yang dilaksanakan tanpa membuang pohon cemara yang menjadi vegetasi alami Pantai Berkas tersebut sekarang benar-benar telah mampu menjadi identitas baru dari Kota Bengkulu.

Di sektor sanitasi, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R (*reduce, reuse, recycle*) dilaksanakan tidak semata-mata untuk mengolah sampah rumah tangga dan limbah tinja saja, tetapi keduanya telah mampu memberikan fasilitas pendidikan dan pagelaran seni, serta ruang bermain anak. Seperti pembangunan IPAL di Benti-ring yang juga dapat dijadikan tempat mengaji anak-anak dan tempat pertemuan warga. Selain itu seperti IPAL di Kebun Ros yang juga dijadikan lapangan badminton, IPAL di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang juga dapat dijadikan sebagai lapangan olahraga basket oleh masyarakat sekitar serta TPS 3R di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu yang menjadi tempat pagelaran gamelan dan taman bacaan masyarakat. Sedangkan IPAL di Desa Watas Marga Kabupaten Rejang Lebong yang menyediakan kolam renang bagi tempat anak-anak bermain.

Di sektor kawasan permukiman, program KOTAKU yang dilaksanakan mampu



memberikan jalan akses menuju tempat wisata sehingga menjadi penunjang dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Seperti yang dilaksanakan di kawasan Kebun Keling yang merupakan kawasan di sekitar Benteng Marlborough. Melalui program KOTAKU, beberapa taman kecil dibangun sehingga mempercantik lingkungan di sekitar kawasan Benteng Marlborough. Selain itu jalan lingkungan yang diberikan lukisan grafiti membuat wisatawan berswafoto ketika melalui kawasan Kebun Keling tersebut. Selain di Kebun Keling, kawasan Dusun Besar juga telah tertata rapi dan indah dengan adanya penataan kawasan melalui program KOTAKU. Hal ini menjadikan kawasan yang dulunya sepi dilalui masyarakat karena kondisinya yang kumuh dan rawan kriminalitas sekarang menjadi akses alternatif dalam menunjang kegiatan perekonomian di pusat perdagangan Pasar Panorama. Oleh karena itu, masyarakat saat ini lebih memilih melalui kawasan Dusun Besar.

Di sektor air minum, pemenuhan kebutuhan air minum di daerah perdesaan melalui program Pamsimas masih menjadi andalan untuk menyukseskan program 100% akses aman air minum di tahun 2019, seperti pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam menangani permasalahan kekurangan air bersih di kawasan kumuh Sumber Jaya. Di sisi lain, Ditjen Cipta Karya melalui Satker PSPAM Bengkulu juga melaksanakan pemenuhan kebutuhan air bersih di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Yunus, Kota Bengkulu sebagai

wujud kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

Selain itu, pembangunan di sektor air minum Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 juga mulai menyentuh sektor pariwisata untuk mendukung Pulau Enggano yang termasuk dalam daftar 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011. Melalui Satker PSPAM Bengkulu, Ditjen Cipta Karya menyiapkan pemenuhan air minum di Pulau Enggano karena selain Pulau Enggano masuk dalam KSPN, tingkat pelayanan air minum di kawasan tersebut masih sangat rendah yaitu hanya 7 liter per hari. Diharapkan dengan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dilaksanakan pada tahun 2018, peningkatan kapasitas air hingga 10 liter per detik dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau Enggano dalam menyukseskan *Wonderful Bengkulu 2020*.

Dengan adanya pembangunan yang menunjang berbagai sektor tersebut diharapkan masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan infrastruktur terbangun agar apa yang telah diwujudkan Pemerintah Pusat dalam menciptakan 100% akses aman air minum, 100% sanitasi, serta 0% kawasan permukiman kumuh dapat berkelanjutan.

\*) Penulis adalah Staf Pengelola Dokumentasi dan Informasi Publik Randal PIP Provinsi Bengkulu, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

# GAGASAN UNTUK PENGETAHUAN PENERAPAN TEKNOLOGI SEKTOR AIR LIMBAH DAPAT MENJADI UJUNG TOMBAK *SUSTAINABLE DEVELOPMENT* WILAYAH

Poedjastanto Soemardono \*)



Rendahnya kesadaran Pemerintah Daerah tentang kelestarian dan kenyamanan lingkungan, khususnya di badan air (sungai, danau, atau embung) yang ada di daerahnya belum tersedia standar kualitas air permukaan atau “*stream standard*” tersebut serta belum tersedianya jaringan pengumpul air limbah di permukiman perkotaan.

**H**al tersebut mengakibatkan masyarakat terpaksa membuang air limbah rumah tangga seperti Buang Air Besar Sembarangan (BABS) tanpa pengolahan apapun yang sesuai standar kualitas lingkungan. Oleh karena itu diperlukan upaya nyata dengan penerapan teknologi pengolahan air limbah rumah tangga berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang *outputnya* mempunyai kualitas *standard effluent*.

Upaya terobosan tersebut diharapkan selain mengurangi beban polusi air permukaan di wilayah tersebut dan yang terpenting adalah memberikan citra positif bagi Pemerintah Daerah untuk mulai menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas air permukaan di wilayahnya, dan membentuk UPT pengelolaan air limbah permukiman.





Walaupun sifatnya *slow yielding* bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi inovasi teknologi PLP dapat memperbaiki kualitas lingkungan yang dapat menjadi awal tumbuh kembangnya berbagai sektor strategis dalam skala regional bahkan nasional, misalnya sektor ekonomi kreatif, olahraga, pariwisata, dan ekonomi lokal (misalnya perikanan darat).

Oleh karena itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat menjadi *agent of development* dengan menciptakan proyek perintis seperti IPAL paket skala kecil dan kota sedang. Hal tersebut diharapkan dapat menggugah kesadaran Pemerintah Daerah tentang pentingnya pengembangan subsektor PLP dengan mengalokasikan APBD secara rasional dan layak untuk menunjang APBN subsektor PLP secara tepat waktu dengan alokasi APBN pada proyek tersebut, sehingga terjadi produk yang sinergis bagi lingkungan dan masyarakat.

Diharapkan Pemda akan mengeluarkan Perda yang mengatur kualitas air limbah yang berasal dari suatu kawasan permukiman dan juga industri yang berada di daerah tersebut. Tentu saja investasi untuk IPAL tersebut akan

mahal apabila belum tersedianya “*stream standard*”, karena sangat menuntut tercapainya *effluent standard* yang seringkali terlalu tinggi untuk kualitas badan air penerima.

Akan tetapi sebagai upaya terobosan hal ini harus dilakukan karena akan mendorong kesadaran Pemerintah Daerah untuk menyusun konsep “*stream standard*” di wilayahnya.

Diharapkan langkah selanjutnya Pemerintah Daerah akan berupaya untuk mencari dana bagi pengembangan pengelolaan air limbah secara luas di daerahnya dan mungkin mengundang investor swasta bagi pengembangan pengelolaan air limbah yang dapat memperbaiki kualitas badan air permukaan yang ada di daerah tersebut. Tentu saja hal ini merupakan potensi bagi pengembangan sektor strategis lainnya yang mempunyai nilai finansial dan ekonomi sebagai hasil sekunder, sementara hasil utama memperbaiki derajat kesehatan masyarakat di daerahnya terutama yang bermukim di sekitar badan air penerima tersebut.

Di sisi teknologi IPAL, dipercaya dari waktu ke waktu akan berkembang selaras dengan kemajuan berbagai cabang teknologi yang memperbaiki proses

biokimia dan fisika serta teknologi material dan elektronika, sehingga akan muncul IPAL yang lebih efektif dan efisien yang dapat menekan biaya investasi maupun operasi dan pemeliharaannya.

Pada dasarnya inovasi teknologi IPAL paket akan menjadi pendorong bagi Pemda dan masyarakat untuk semakin menuntut ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang mencakup sistem jaringan pengumpul air limbah dan diakhiri dengan ketersediaan bangunan IPAL perkotaan yang lebih menjamin terjaganya kualitas badan air permukaan di daerah tersebut. Dengan begitu akan menumbuhkan berbagai pertumbuhan dan perkembangan sektor strategis lainnya sebagai pembangunan yang berkelanjutan, misalnya tumbuhnya sektor wisata air dan sektor ekonomi kreatif lainnya sejalan dengan meningkatnya kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

Hal tersebut di atas akan mengembangkan sektor industri yang menyerap tenaga kerja karena terbukanya lapangan kerja baru serta meningkatkan kualitas SDM.

\*) Penulis adalah, Purna Bhakti Pembina Utama (GOL.IV/E) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



# Apa ? Kata Mereka

“Cita-cita kita untuk membangun kota yang berkelanjutan memang kendaraannya, alatnya, atau caranya dengan membangun yang disebut program pembangunan perkotaan nasional/NUDP (*National Urban Development Program*). Saya harap kota kita jadi lebih baik perencanaan dan pembangunannya tidak sembarangan atau tanpa arah, serta memiliki ciri khas masing-masing”.

TRI DEWI VIRGIYANTI, DIREKTUR PERKOTAAN, PERUMAHAN, DAN PERMUKIMAN  
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS



“Kita fokuskan ke *zero slum area for challenge*-nya itu bukan untuk mengurangi daerah kumuh secara fisik tapi melengkapi dengan pemberdayaan masyarakat. Kawasan kumuh ini jangan sampai masyarakat tidak berdaya jadi buat kan warga UMKM, jadi ada paket lain untuk mengiringi penataan kawasan”.

BIMA ARYA, WALIKOTA BOGOR

*“I’ve read too much about Indonesia, the improvement of connectivity is very crucial because transportation and network whether by plane, or by sea, or by road is very good for business”. For the craft you need to try the economic craft that is interesting, it’s also very difficult when I saw the country but then I looked at the efforts what you are doing”.*

HABOFANOE LEHANA, MINISTRY OF LOCAL GOVERNMENT AND CHIEFTAINSHIP AFFAIRS LESOTHO







“Saya rasa itu suatu hal yang baik supaya mereka mempunyai *network* sosial dari *stakeholder* di *urban forum* yang ada di Malaysia, karena yang datang dari semua negara. Maka dari itu bisa saling bekerja sama bagaimana membangun *urban city* yang baik dan yang kedua dari KBRI kita bisa sampaikan bahwa kita mempunyai rencana dan pengharapan kepada mereka terutama untuk Warga Negara Indonesia yang ada di Malaysia”.

RUSDI KIRANA, DUBES RI UNTUK MALAYSIA

“Sebetulnya kita memiliki 35 strategi prioritas nasional, Indonesia kelihatannya jauh lebih siap dimana *public work department* menjadi *leading* sektornya untuk membangun infrastruktur juga. Setelah itu pembangunan manusianya supaya tidak terlalu takut. Jadi membangun infrastruktur dan *human development* juga, membangun fisik, dan sosial”

DR. RALDI HENDRO KOESTOER, STAF AHLI KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN



“Forum ini sebenarnya kita berbicara bagaimana menangani kawasan kumuh dengan melibatkan semua pihak, termasuk pihak *private sector*. Masalah kawasan kumuh itu di antaranya adalah kesenjangan pendanaan, kita berpikir harusnya bisa menciptakan bagaimana ide baru kita bisa mendanai penanganan kawasan kumuh.”

OSWAR MUNGKASA, DEPUTI GUBERNUR BIDANG TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA

“Saya punya pengalaman bahwa yang baik adalah yang datang dari masyarakat itu sendiri, kalau ada program dari masyarakat kemudian mereka menerima dan melaksanakan sendiri. Itu merupakan suatu *project* yang amat baik, dan mereka sendiri yang akan memastikan *project* itu berjaya”.

YBhg. DATUK SERI HAJI HASYIM BIN HAJI ISMAIL





## PERESMIAN LAPANGAN TENIS *INDOOR* DAN *OUTDOOR*





# KUNJUNGAN PRESIDEN KE WISMA ATLET KEMAYORAN





## Sumatera Selatan Siap Jalankan Program Padat Karya 2018

Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) telah mulai melakukan rapat pembahasan sekaligus survei untuk menentukan desa yang menjadi sasaran program padat karya di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam agenda rapat bersama jajaran beberapa waktu lalu, PPK Randal Provinsi Sumatera Selatan Yudiansyah menjelaskan bahwa program padat karya di Musi Rawas ini dapat dimulai di awal Maret 2018 dengan rencana penyelesaian 90 hari. Yudi menyebutkan program padat karya di Musi Rawas ini nantinya terdiri dari program PI-SEW, Pamsimas, dan Sanimas. **(Teks: R.B-Randal Sumsel/ari)**



## Cipta Karya Serahkan TPA Sampah Kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara telah menunjukkan keberpihakannya terhadap pembangunan daerah Kabupaten Kolaka Timur (Koltim). Dengan ditematkannya kegiatan yang penting bagi daerah Kabupaten Koltim yaitu Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah yang melayani 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tirawuta, Kecamatan Loea, Kecamatan Ladongi dengan jumlah penduduk dilayani 48.340 yang dibangun Desa Lara, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sultra.

Hal tersebut diutarakan oleh Bupati Kolaka Timur Tony Herbiansyah, pada saat acara penyerahan pengelolaan dan pemanfaatan aset TPA Sampah di Kabupaten Kolaka Timur, Rabu (31/01/2018). **(Teks: Eny-Ikra Randal Sultra/ari)**

## Cipta Karya Percepat Proses Hibah Lahan Penataan Kawasan Permukiman Nelayan di Bengkulu



Sehubungan dengan pengalihan status pengalihan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan rencana pemberian sertifikat tanah oleh PT. Pelindo II (Persero) kepada masyarakat setempat pada kegiatan Penataan Kawasan Kampung Sejahtera Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama dengan PT. Pelindo II, Kementerian PUPR, dan seluruh instansi terkait mengadakan Rapat Pembahasan Pendataan Masyarakat yang akan menerima hibah lahan dari PT. Pelindo II Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Kamis (08/02/2018) di Bengkulu.

**(Teks: Memo/Indah/Rdlbkl/ari)**



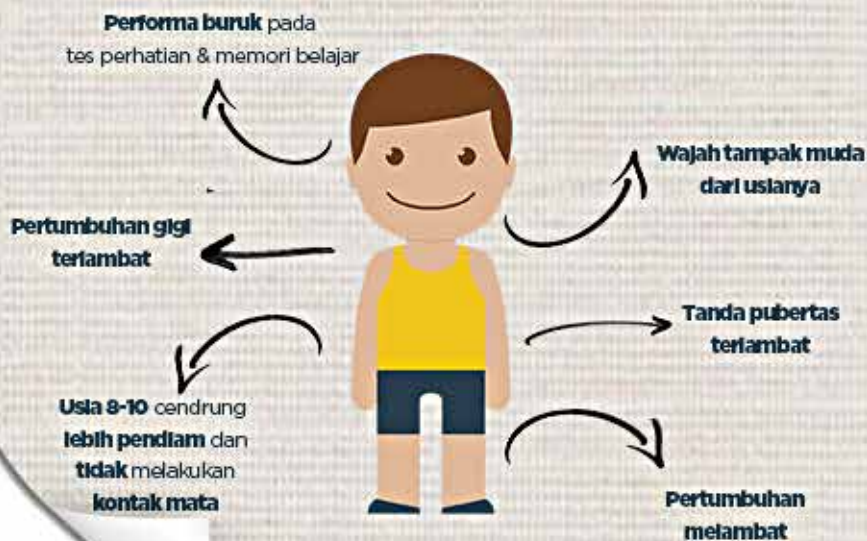
# TAHUKAH SAHABAT ?

## Apa itu **STUNTING** ?

**STUNTING** merupakan gangguan pertumbuhan kronis pada anak akibat kekurangan asupan nutrisi atau malnutrisi dalam waktu cukup lama.



## Ciri-ciri **STUNTING**



## Penyebab utama **STUNTING**

1. Kurangnya makanan bergizi ketika hamil, menyusui maupun MPASI



2. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi



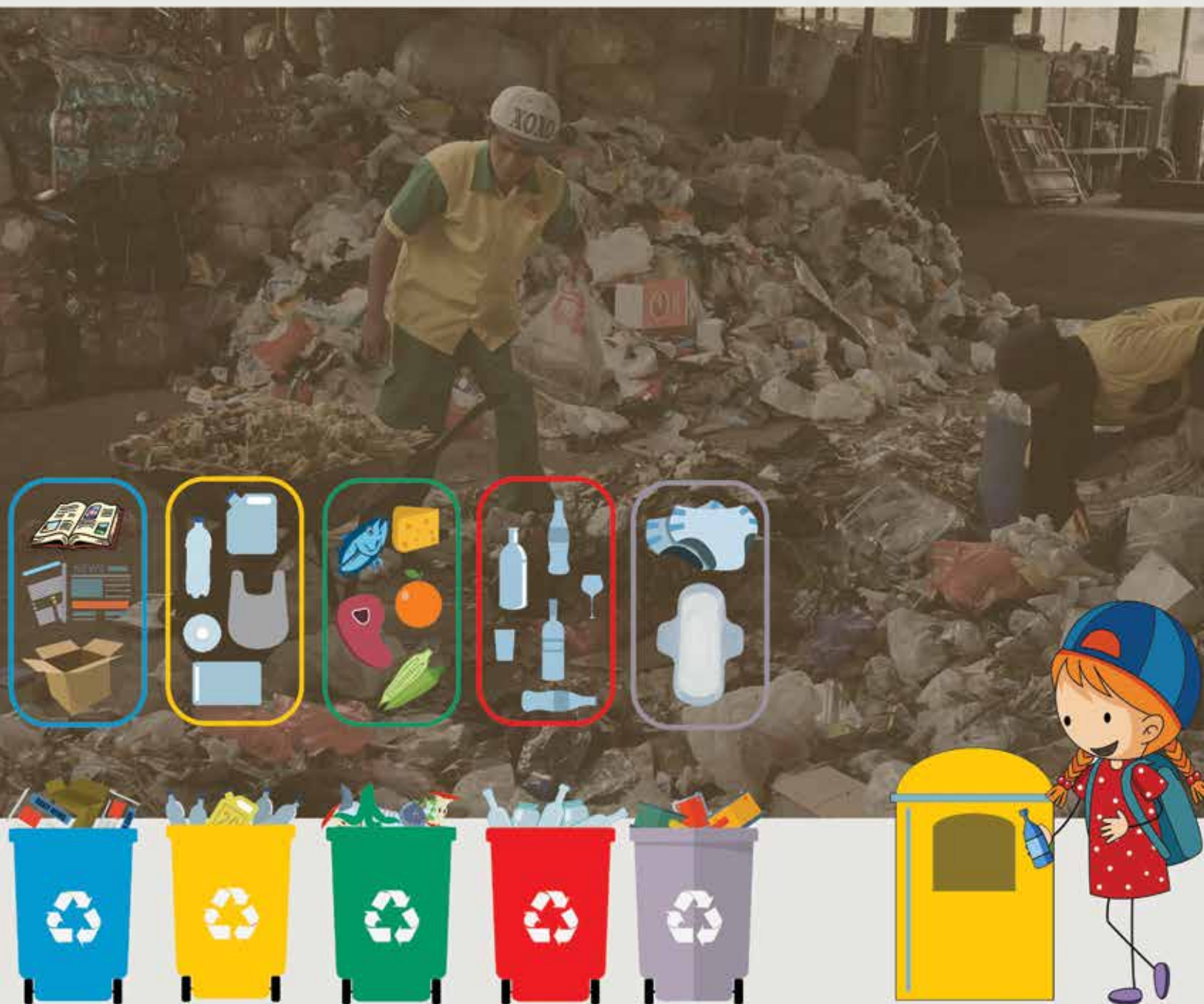
KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT

sumber : ibudanbalita.com



# Hari Peduli Sampah Nasional

21 Februari



[www.ciptakarya.pu.go.id](http://www.ciptakarya.pu.go.id)



@ditjenciptakarya



Ditjen cipta karya



@ditjenck



Ditjen cipta karya